

**IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KESEHATAN (BPJS) DALAM PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS WATUBANGGA KABUPATEN KOLAKA**

**FATMA MULYANI**

**H. Makmur Kambolong**

**Suriyani BB**

**Fatmamulyani@gmail.com**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS HALU OLEO  
KENDARI  
2018**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) di puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah dilapangan.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut implementasi program BPJS Kesehatan dalam pelayanan publik di Puskesmas Watubangga telah berjalan dengan baik didukung dengan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, biaya pelayanan, produk yang digunakan untuk pelayanan dan sarana prasarana pendukung pelayanan untuk mengkomunikasikan program BPJS Kesehatan dengan sumber daya yang digunakan berupa pegawai dan anggaran kerja, memperhatikan disposisi yang tepat untuk menata pelaksanaan program BPJS Kesehatan serta membentuk struktur birokrasi untuk melindungi pelaksanaan kegiatan program BPJS Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka. Walaupun demikian masih ada terdapat warga yang tidak dapat memanfaatkan program BPJS Kesehatan karena kurangnya informasi yang diperoleh dan lokasi domisili yang tidak terjangkau oleh pelayanan program BPJS Kesehatan sehingga mereka belum dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik. Namun secara keseluruhan diperoleh bahwa implementasi program BPJS Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka sudah dilakukan dengan baik.

**Kata kunci : *Implementasi program BPJS Kesehatan***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah puskesmas.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pelayanan Publik di Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dalam pelayanan publik di puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pelayanan Publik di Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka.
2. Untuk mengetahui manfaat implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dalam pelayanan public di Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis  
Bagi ilmu pengetahuan : Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan yang berkaitan langsung dengan implementasi program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Pemerintah Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka : Dapat memberikan masukan positif bagi pihak pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan implementasi program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam pelayanan publik.
  - b. Bagi masyarakat : Menambah pengetahuan mengenai program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan agar lebih memudahkan jika ingin memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Kebijakan**

“secara etimologis istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta/polis (Negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan menjadi policie yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan” (dalam Dunn 2003:51).

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Kismartini, dkk (2005:1), mengemukakan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan di laksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

### **B. Konsep Kebijakan Publik**

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencangkup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual (Subarsono, 2005 : 8)

### **C. Konsep Implementasi**

Implementasi sebagai suatu konsep tindak lanjut pelaksanaan kegiatan cukup menarik untuk dikaji oleh cabang cabang ilmu. Hal ini semakin mendorong perkembangan konsep implementasi itu sendiri, disamping itu juga menyadari bahwa dalam mempelajari implementasi sebagai suatu konsep akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan yang telah diputuskan.

### **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi**

Menurut Eugene (Agustino, 2006:153) mengungkapkan kerumitan dalam proses implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi

merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi dalam melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang.

#### **E. Konsep Pelayanan Publik**

Pengertian pelayanan publik menurut Widodo (2001:209) adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada kepentingan organisasi sesuai dengan aturan pokok atau tata cara yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Thoha dalam Seanipar (1997:78) menyatakan bahwa pelayanan publik adalah sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

#### **F. Tinjauan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan**

Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang diatur oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia maka Undang-undang BPJS memberikan batasan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang jelas kepada BPJS dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja BPJS tersebut secara transparan.

#### **G. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)**

Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang diatur oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya telah dibayar oleh pemerintah.

#### **H. Kerangka Pikir**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana dilakukan pada bab sebelumnya, serta berdasarkan kajian beberapa teori implementasi kebijakan publik di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian yaitu implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pedoman pelaksanaan program, dan dapat memperoleh keberhasilan.

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini adalah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yaitu Puskesmas Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.

#### **B. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam penelitian, dimana informan sebagai kunci dan informan sebagai instrument pendukung, dengan menggunakan alat bantu panduan wawancara dan alat rekam suara dan video (kamera digital/hp). Peneliti berperan sebagai pengamat untuk mengobservasi secara langsung, sekaligus sebagai partisipan untuk melakukan interaksi dengan obyek penelitian lapangan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Puskesmas Watubangga/dokter, bidan 1 orang dan perawat 1 orang.
2. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) berjumlah 3 orang.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi : sejarah singkat berdirinya, letak geografis, obyek, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan pegawai dan keadaan sarana dan prasarana.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer,

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber informasi berasal dari informan yang dianggap mengetahui permasalahan dengan jelas, dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi yang baik serta mampu mengemukakan pendapat secara baik dan benar yang berkaitan dengan variabel pelaksana program Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

2. Data sekunder,

Data sekunder yaitu data perlengkapan yang diperoleh dari data puskesmas Watubangga, buku teks, dokumen-dokumen, laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang dan masalah penelitian.

2. Observasi (*Observation*)

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif juga sebagai kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuai objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang

dilakukan objek tertentu. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pelayanan publik.

3. Dokumentasi (*Documentation Study*)

Studi dokumen dimaksud sebagai pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, literatur, laporan tahunan, jurnal, table, karya tulis ilmiah, dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan, meliputi : UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan data dinas kesehatan Sulawesi Tenggara 2016.

**E. Teknik Analisis data**

Jenis penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Menurut Nasution (Sugiono, 2016) menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

**F. Definisi Konsep**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi 2 (dua) definisi konsep. Hal ini terkait dengan kerangka piker yang telah dikemukakan sebelumnya, maka definisi konsep pada penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ada 4 (empat) faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :
  1. Komunikasi, yaitu keberhasilan suatu implementasi kebijakan memberikan persyaratan kepada implementator dengan maksud agar mengetahui apa yang harus dilaksanakan. Sasaran (target group), sehingga akan mengurangi adanya distorsi implementasi jika tujuan dan sasaran tidak jelas dan tidak dipahami, maka akan terjadi resistensi dari suatu kelompok sasaran;
  2. Sumber daya manusia (SDM), meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik dan konsisten secara jelas, tetapi tidak disertai dengan sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif;
  3. Disposisi, watak dan prilaku yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis; dan
  4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, salah satu aspek yang penting dalam setiap

organisasi adalah prosedur operasional standar (Standar Operating Procedures atau SOP) yang dijadikan pedoman bagi setiap implementator bertindak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Letak Geografis

Kecamatan Watubangga adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Kolaka dengan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten 66,1 km. Ibukota Kecamatan Watubangga terletak di sebelah selatan dari ibukota Kabupaten Kolaka, memiliki luas wilayah 97,12 km<sup>2</sup> yang terdiri dari wilayah dataran 30%, perbukitan 50% dan perairan 20%. Dilihat dari segi geografis Kecamatan Watubangga memiliki batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanggetada;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Toari;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Polinggona.

#### 2. Demografi

Kecamatan Watubangga terdiri dari 3 Kelurahan dan 11 desa. Jumlah penduduk Kecamatan Watubangga sebanyak 17.132 jiwa atau 4.602 kepala keluarga. Data ini memiliki kaitan dengan pelayanan Puskesmas Watubangga yaitu melayani kesehatan masyarakat di Kecamatan Watubangga. Dalam pelaksanaan penelitian ini ditemukan bahwa masih ada warga masyarakat yang belum terjangkau oleh pelayanan Puskesmas Watubangga. Namun demikian hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak pemerintah daerah untuk mengembangkan jangkauan pelayanan Puskesmas Watubangga di Kabupaten Kolaka.

#### 3. Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Watubangga secara sosial ekonomi adalah terdiri dari berbagai macam suku bangsa yaitu tolaki morenene, tolaki mekongga, bugis-makassar, jawa dan bali yang mayoritas bekerja sebagai petani/pekebun dan nelayan disamping pekerja lain seperti wiraswasta, PNS dan TNI/POLRI.

### B. Gambaran Umum Puskesmas Watubangga

Puskesmas Watubangga adalah salah satu puskesmas perawatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka yang berkedudukan di Kecamatan Watubangga dengan jarak tempuh kurang lebih 60 km ke arah selatan dari ibu kota Kabupaten Kolaka. Puskesmas ini dibangun pada tahun 1991 di atas tanah seluas 1200 m<sup>2</sup>.

### C. Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Program pemerintah untuk bidang kesehatan telah dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti program yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan tujuan untuk mengoprasikan program bernama JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

### D. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka

Pelayanan menjadi suatu kata yang menggambarkan adanya tindakan untuk melaksanakan pekerjaan jasa kepada orang lain yang membutuhkannya. Dalam penelitian ini pelayanan digunakan untuk membangun masyarakat yang sehat di Kecamatan Watubangga. Pelayanan publik dalam lingkup kerja Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kebutuhan layanan kesehatan sesuai

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program BPJS Kesehatan dalam pelayanan publik di Puskesmas Watubangga telah berjalan dengan baik didukung dengan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, biaya pelayanan, produk yang digunakan untuk pelayanan dan sarana prasarana pendukung pelayanan untuk mengkomunikasikan program BPJS Kesehatan dengan sumber daya yang digunakan berupa pegawai dan anggaran kerja, memperhatikan disposisi yang tepat untuk menata pelaksanaan program BPJS Kesehatan serta membentuk struktur birokrasi untuk melindungi pelaksanaan kegiatan program BPJS Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka. Walaupun demikian masih ada terdapat warga yang tidak dapat memanfaatkan program BPJS Kesehatan karena kurangnya informasi yang diperoleh dan lokasi domisili yang tidak terjangkau oleh pelayanan program BPJS Kesehatan sehingga mereka belum dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik. Namun secara keseluruhan diperoleh bahwa implementasi program BPJS Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka sudah dilakukan dengan baik.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang disajikan sebelumnya, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasi program BPJS Kesehatan dengan baik, maka warga masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan informasi dari Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka agar dapat mengikuti program BPJS Kesehatan dengan memperoleh pelayanan kesehatan gratis dalam program BPJS Kesehatan.
2. Sebaiknya program BPJS Kesehatan disosialisasi secara berkala di desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Watubangga supaya warga masyarakat dapat memanfaatkan program BPJS Kesehatan dengan baik.
3. Untuk mensosialisasi program BPJS Kesehatan dengan baik, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya perlu menyediakan pusat komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang mendukung penyelenggaraan program BPJS Kesehatan kepada masyarakat dimasa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**



- Abdullah, Syukur, 1988. *Laporan Temukajian Posisi Dan Peran Ilmu Administrasi Negara Dan Manajemen*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation
- Agustino, L., 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabet, Bandung
- Dewa, Jufri, 2011. *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Kendari, Unhalu Press
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis kebijaksanaan Publik*. University press.
- Islamy, Irfan, 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakrta : Bumi Aksara,
- Kismartini, dkk ,2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, edisi I*. Yogyakarta : BPFPE
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. Surabaya: PMN.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Putra, Nanang Thomas. 2009. *Implementasi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surabaya Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surakarta*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas sebelas Maret Surakarta.
- Pasalong, harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : alfabeta
- Ripley, Randal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation And Bureaucracy*. Chicago : the Dorsey press
- Seanipar. 1997. *Manajemen Pemasaran Publik*. Gunung agung : Jakarta
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*. Bandung : Alfabeta
- Tangkilsan, H. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Utomo, 2003. *Administrasi Publik Baru di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. 1997. *Analisis Kebijakan Dari formulasi kebijaksanaan ke implementasi kebijakan Negara*, Jakarta: BumiAksara.
- Wahab, S. 1991. *Evaluasi Kebijakan kebijakan*: Penerbit FIA. Universitas Brawijaya dan IKIP. Malang
- Wahab, S. 2002. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, 2001. *Pemberdayaan Kelembagaan Daerah*. Remaja Rosada. Bandung
- Widodo, 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media
- Widodo, 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Malang : Banyu Media Publishing

Winarno, Budi.2007.*Kebijakanpublik :Teori dan Proses*, Yogyakarta: media pressindo

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*.Yogyakarta : CAPS

**Dokumen – Dokumen Lain :**

Mathew Miles, B.A, Michael Huberman, Saldana, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah TjetjepRohendi Rohidi, UI Press. Jakarta. 2014, hlm.31-33

Siregar,BoykeP.(11Desember2015). '*PesertaBPJSKesehatanJadi 155Juta*',Warta Ekonomi.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Keputusan Menteri Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2014

Data Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara 2016

Depkes Republik Indonesia Tahun 2009